

BAB 1. PENDAHULUAN

I.I. Latar Belakang

Indonesia memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi megabiodiversitas. Eksploitasi hutan Indonesia secara besar-besaran dimulai dengan keluarnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dilanjutkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pemungutan hasil Hutan (HPHH) dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang menyatakan bahwa negara menilai hutan harus segera dimanfaatkan dengan maksimal karena merupakan salah satu kekayaan alam yang potensial. Oleh sebab itu disaat hutan masih luas, keberhasilan perusahaan HPH hanya dinilai dari besarnya jumlah volume kayu yang ditebang dan bukan upaya keberhasilan pengamanan hutan untuk rotasi tebangan selanjutnya. Dalam kondisi demikian, kayu merupakan penyumbang devisa kedua pada tahun 1980-an dan 1990-an setelah minyak bumi dan tekstil. Akibat pemanenan secara besar-besaran, membuat laju deforestasi meningkat tajam dari tahun ke tahun (Purwanto, 2007)

Kawasan konservasi merupakan benteng terakhir pertahanan kawasan hutan di Indonesia. Dengan luas ± 22 juta ha, keberadaan kawasan konservasi mewakili sebagian besar hutan primer di seluruh Indonesia. Pengelolaan kawasan konservasi juga harus berpegang teguh terhadap tiga pilar yaitu perlindungan, pengawetan serta pemanfaatan. Maka dari itu, untuk mempertahankan sumberdaya yang dimiliki perlu adanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang merupakan usaha pembangunan yang mencakup segi social ekonomi, dan lingkungan dengan merubah paradigma pemanfaatan sumberdaya ke arah pemanfaatan jasa lingkungan.

Salah satu *trend* dalam pemanfaatan lestari kawasan konservasi adalah pariwisata alam atau ekowisata (*ecotourism*). Pola pemanfaatan ini menghasilkan nilai ekonomi, terutama bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi, dari keberadaan dan kelestarian kawasan tanpa harus mengekstrak fisik sumberdaya

alam (lahan atau kayu) kawasan tersebut. Suwantoro (2004) menyebutkan bahwa pada 1993 *The Economic Society*, yang merupakan organisasi non profit yang dibentuk pada tahun 1991 di Amerika Serikat, memberi definisi tentang ekowisata yaitu suatu perjalanan yang bertanggung jawab ke suatu daerah alami yang melestarikan lingkungan dan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat disekitarnya.

Peningkatan kesejahteraan (pendapatan) masyarakat lokal oleh aktivitas ekowisata sebagaimana disebutkan oleh *The Economic Society* tersebut mengarah pada salah satu komponen indikator pertumbuhan ekonomi, yaitu : pendapatan perkapita. Sementara, sebagai sebuah aktivitas produktif, industri ekowisata itu sendiri adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Menurut Adrimas (2012), pembangunan ekonomi tidak hanya berarti pertumbuhan output tetapi juga merupakan penambahan jenis output yang diproduksi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan output dari waktu ke waktu.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 sd 2019, pariwisata menjadi bagian dari dimensi pembangunan sektor unggulan dan prioritas dengan potensi keindahan bentang alam dan budaya yang unik sebagai modal pengembangan pariwisata, dengan arah kebijakan merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS), yaitu (1) pemasaran pariwisata nasional; (2) pembangunan destinasi pariwisata; (3) pembangunan industri pariwisata; (4) pembangunan kelembagaan pariwisata.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Kehutanan selaku pemangku kawasan dengan objek daya tarik wisata alam yang besar, dalam Rencana Strategis 2015-2019 memiliki sasaran program meningkatnya penerimaan devisa negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati dengan Indikator Kinerja Kegiatan berupa peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara

(BBKSDASU) sebagai salah satu UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menargetkan kenaikan jumlah kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara dalam Rencana Strategis 2015 – 2019, dengan strategi pengembangan

wisata alam berbasis masyarakat lokal, serta optimalisasi pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam di kawasan konservasi, dengan mengoptimalkan fungsi kawasan.

Sumatera Utara sudah sejak lama menjadi daerah tujuan wisata Indonesia. Publikasi berjudul *Pariwisata Indonesia 1978* terbitan Direktorat Jenderal Pariwisata, Departemen Perhubungan RI pada tahun 1978, sebagaimana dikutip oleh Pendit (1981), menyebutkan bahwa sepuluh Daerah Tujuan Wisata Indonesia meliputi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Raya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Jogjakarta, Bali, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Utara Sumatera Barat, Sulawesi Selatan.

Danu Toba dan Berastagi adalah objek wisata utama yang menjadi andalan di Sumatera Utara bahkan sejak publikasi tahun 1978 di atas. Dalam periode 3 dekade terakhir, Bukit Lawang dan Tangkahan menjadi objek wisata baru yang dapat menarik turis mancanegara. Kedua destinasi baru ini merupakan lokasi ekowisata di kawasan konservasi, keduanya berada di Taman Nasional Gunung Leuser.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dijelaskan bahwa sejalan dengan perkembangan kebutuhan pariwisata alam, maka taman nasional, tahura, suaka margasatwa, dan twa, yang memilikikeunikan, keindahan alam, dll, sangat vberpotensi untuk dikembangkan menjadi daya tarik dan obyek wisata alam di samping sebagai lokasi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pendidikan. Agar obyek daya tarik wisata alam tersebut dapat digunakan secara nyata dibutuhkan teknologi dan modal. Maka dari itu, modal teknologi dan masyarakat yang sesuai, perlu turutserta dalam pengusahaan pariwisata alam. Pengusahaan pariwisata alam di taman nasional, tahuta, suaka margasatwa, dan taman wisataalam memberikan dampak positif dalam menciptakan kesempatan kerja, membuka lapangan usaha, peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, pemasukan devisa dan pendapatan negara. Selain itu pula untuk pemerataan pembangunan, pengembangan wilayah, meningkatkan rasa cinta tanah air, budaya dan bangsa.

Eksplorasi dan pengembangan lokasi wisata baru adalah suatu kewajiban bagi upaya mempertahankan industri pariwisata di Sumatera Utara. Pada tahun 2013, catatan Badan Pusat Statistik menyebutkan 259.299 turis mancanegara memasuki Sumatera Utara melalui pintu masuk, mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat selama satu dekade, dimana pada tahun 2003 jumlah wisatawan yang masuk ke Sumatera Utara melalui pintu masuk sebesar 98.336 wisatawan mancanegara. Besar kemungkinan peningkatan tersebut didorong oleh pembangunan wisata baru Bukit Lawang dan Tangkahan yang dibuka pada tahun 1996 dan tahun 2004 yang menyerap sebagian besar kunjungan wisatawan asing dan lokal pada masa itu.

Sejak tahun 2014, CV. Barumun Nagari yang merupakan program kerjasama Yayasan Persamuan Bodhicitta Mandala Medan (YPBMM) dan pengusaha lokal, Kasim Hasibuan bersama BBKSDASU merintis pembangunan destinasi pariwisata baru di kawasan penyangga Suaka Margasatwa (SM) Barumun di Desa BatuNanggar, Kabupaten PadangLawasUtara. Lokasi wisata yang disebut Barumun Nagari ini menjadi calon tujuan wisata baru di Propinsi Sumatera Utara bersama dengan Sibolga dan kepulauan di pesisir Tapanuli Tengah dan diharapkan menjadi salah satu mata rantai pariwisata Sumatera Utara. Bentuk wisata yang disajikan Barumun Nagari berupa wisata alam dengan berbagai pengelolaan dan kegiatan berbasis konservasi dengan bermacam objek daya tarik wisata alam antara lain flora fauna, sejarah budaya, bentang alam dan sebagainya.

Dalam tahap perencanaan dan pembangunan ekowisata Barumun Nagari, pihak pengelola masih terus menggali potensi kawasan sebagai daya tarik wisata, mengingat kawasan tersebut sebagai penyangga kawasan konservasi yang diharapkan dapat memberikan dukungan dan perlindungan terhadap kawasan sekaligus memberikan nilai tambah berupa peningkatan ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar kawasan. Masih kurangnya keterlibatan dan masih minimnya pengalaman pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata menjadi permasalahan tersendiri dalam perencanaan pengelolaan Ekowisata Barumun Nagari, hal ini dapat terlihat dari minimnya pembangunan pariwisata di Kabupaten Padang Lawas Utara tersebut.

Sebagai suatu usaha yang baru, Ekowisata Barumun Nagari juga membutuhkan investasi yang besar dalam pembangunan dan pengembangan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Maka dari itu, pihak pengelola membutuhkan investor yang mau menanamkan modal. Menurut Khasmir dan Jafar (2003), investasi dalam sebuah proyek atau usaha baik yang telah berjalan ataupun baru dibuka disesuaikan dengan misi perusahaan. Tujuan perusahaan didirikan salah satunya adalah untuk mencari keuntungan (*profit*). Agar tujuan tersebut dapat tercapai, jika ingin melakukan investasi, terlebih dahulu melakukan studi kelayakan bisnis, dengan salah satu tujuan untuk mencari solusi meminimalisir resiko dan hambatan yang mungkin muncul pada masa depan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasar atas uraian di atas, terkait pengembangan Ekowisata Barumun Nagari sebagai lokasi wisata baru dalam industri pariwisata di Sumatera Utara, beberapa hal dapat dijadikan sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini, antarlain :

1. Bagaimana kondisi (*existing condition*) dan potensi kawasan Ekowisata Barumun Nagari?
2. Bagaimana kelayakan finansial pengembangan objek wisata di kawasan Ekowisata Barumun Nagari?
3. Apa saja program pengembangan kawasan ekowisata Barumun untuk peningkatan pengelolaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasar atas rumusan masalah di atas, tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan kondisi dan potensi kawasan ekowisata Barumun Nagari.
2. Menganalisis kelayakan finansial pengembangan objek wisata di kawasan ekowisata Barumun Nagari
3. Menyusun program pengembangan kawasan ekowisata Barumun Nagari.

1.4. Manfaat Penelitian

Harapan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ekowisata Barumun Nagari, terutama:

1. Bagi pengelola, dapat menjadi rujukan dalam upaya pengembangan dan pembangunan ekowisata Barumun Nagari.
2. Bagi BBKSDA Sumatera Utara, dapat menjadi bahan dalam menentukan kebijakan-kebijakan strategis dalam upaya konservasi SM Barumun dan pengembangan pemanfaatan lestari kawasan konservasi SM Barumun.
3. Bagi pemerintah daerah, dapat menjadi bahan dalam menyusun kebijakan di tingkat kabupaten dan tingkat propinsi dalam pengembangan pariwisata.
4. Bagi penulis untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam penerapan ilmu Perencanaan pembangunan, dan sebagai salah satu persyaratan kelulusan program Magister Perencanaan Pembangunan.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini dititikberatkan kepada analisa perencanaan pengembangan kawasan ekowisata Barumun Nagari, yang mencakup deskripsi kondisi dan potensi, analisa kelayakan secara finansial, dan program yang dapat dilaksanakan untuk pengembangan kawasan.

1.6. Sistematika penulisan

- Bab I: Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang dan perumusan masalah tujuan, dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan sistematika penulisan.
- Bab II: Pendekatan teori dan studi literatur, berisi teori dan tinjauan literatur tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian. Literatur dan teori ini menjadi dasar perbandingan dengan hasil yang diperoleh.
- Bab III: Metodologi penelitian, yaitu bab yang membahas tentang metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan penelitian, sumber data yang diperlukan, proses pengumpulan data, pengolahan data serta analisa data.

- Bab IV: Kondisi umum lokasi penelitian yang bercerita tentang gambaran umum, uraian mengenai lokasi dan objek penelitian yang berkaitan dan berhubungan dengan kegiatan penelitian.
- Bab V: Hasil dan pembahasan yang menjelaskan mengenai uraian hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Pembahasan hasil harus mengacu terhadap rumusan masalah.
- Bab VI: Kesimpulan dan saran, berisi kumpulan semua hasil yang diperoleh pada penelitian dan saran yang dapat membangun untuk penelitian maupun Perencanaan selanjutnya.

